

Kajian Kebijakan Publik Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Azis dan Relevansinya dengan Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia Saat ini (Perspektif Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan)

Setiyanto Priyonggo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka
Priyonggo87@gmail.com

Lucky Nugroho

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana
Email: lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

Zulfahmi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka
Email: fahmi@ecampus.ut.ac.id

Korespondensi penulis: lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

Abstract. The aim of this research is to determine the current level of unemployment and poverty in Indonesia and the public policies that can be implemented as a solution to these problems. The method used is descriptive qualitative research which aims to provide an overview or explanation related to the problem formulation. The results of this research are (i) The Indonesian government can implement public policies that support the utilization of the potential of the agricultural sector and existing agricultural land to improve community welfare, create jobs and reduce unemployment rates as was implemented during the time of the Caliph Umar bin Abdul Aziz. (ii) The Indonesian government can implement public policies based on the principles of good zakat and tax governance that were implemented during the time of Caliph Umar bin Abdul Aziz. The implications of this research provide information regarding the comparison of unemployment rates and poverty rates in Indonesia with other countries in the world and also during the time of Caliph Umar bin Abdul Aziz. Therefore, the latest in this research is related to the relevance of public policy during the government of Caliph Umar bin Abdul Aziz in order to reduce unemployment and alleviate poverty with the current public policy of the Indonesian government.

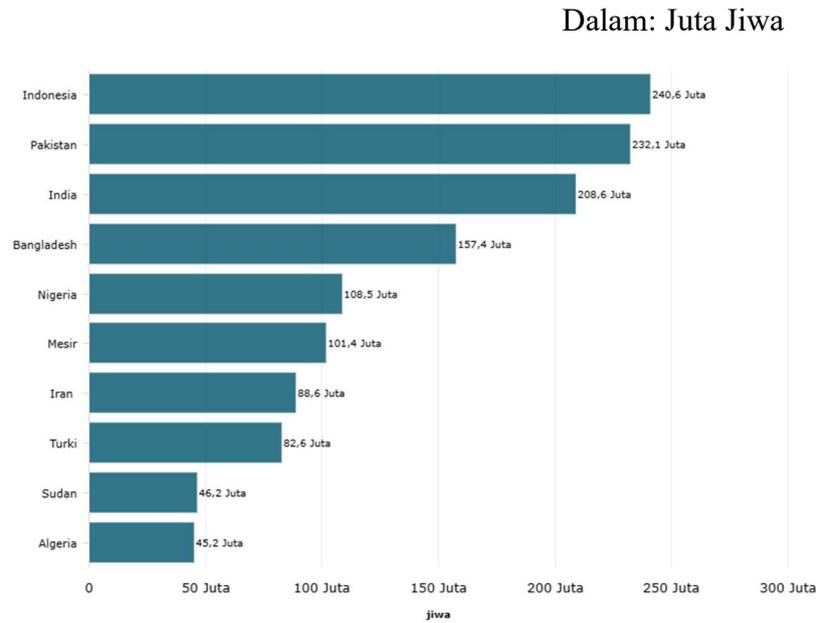
Keywords: Public Policy, Unemployment, Hunger, Human Development Index, Poverty

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia pada saat ini serta kebijakan publik yang dapat diterapkan sebagai solusi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang terkait rumusan masalah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah (i) Pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan kebijakan publik yang mendukung pemanfaatan potensi sektor pertanian dan lahan pertanian yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka pengangguran seperti yang diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. (ii) Pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan kebijakan publik yang berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola zakat dan pajak yang baik yang pernah diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Implikasi dari penelitian ini memberikan informasi berkaitan dengan perbandingan tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan di Indonesia dengan negara-negara lain di dunia dan juga pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oleh karenanya, keterbaruan pada penelitian ini berkaitan dengan relevansi kebijakan publik pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam rangka mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan dengan kebijakan publik pemerintah Indonesia saat ini.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Pengangguran, Kelaparan, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan

LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, melampaui jumlah Muslim di negara-negara Timur Tengah (Fasa et al., 2020; Muhtadi et al., 2023; Nugroho, 2023b, 2023a). Selanjutnya menurut Annur & Santika (2023) perbandingan jumlah Muslim di Indonesia dengan negara lain di dunia adalah sebagai berikut:



Sumber: Annur & Santika (2023)

Gambar 1. Sepuluh Negara di Dunia dengan Populasi Muslim Terbesar

Merujuk pada gambar 1 di atas, maka dapat diuraikan bahwa dengan jumlah muslim sebesar 240 juta jiwa menjadikan Indonesia negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal tersebut menunjukkan Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan dan penerapan kehidupan beragama Islam dan juga tata kelola pemerintahan bagi negara-negara maupun masyarakat muslim dunia. Lebih lanjut, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan perkembangan industri keuangan syariah terbaik di dunia (Bilgies et al., 2023; Ridwan et al., 2023). Pada sisi lain pemerintah juga berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai negara pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia pada tahun 2024. Namun demikian, pada sisi lain variabel-variabel kesejahteraan seperti pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia masih perlu ditingkatkan dikarenakan masih tergolong rendah. Menurut Nugroho et al. (2017), tujuan dari ekonomi syariah adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dimana indikator dari kemaslahatan adalah kesejahteraan masyarakat pada negara tersebut.

Berefleksi pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz sebagaimana yang dinyatakan oleh Rosyidi (2017) dan Harahap (2016) kesejahteraan penduduk Muslim di bawah pemerintahannya sudah sangat baik ditunjukkan dengan sulitnya pegawai pemerintahan dalam menyalurkan dana baitul mal dimana tidak ditemukan penerima sedekah hingga seseorang merasa kesulitan untuk menyalurkan sedekahnya. Selain itu, tidak ada lagi masyarakat yang memiliki hutang yang belum terbayar, dan kebutuhan dasar mereka tercukupi dengan baik (Sali, 2019).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana tingkat pengangguran di Indonesia pada era Kabinet Indonesia Maju dibandingkan dengan negara-negara di dunia dan juga dengan kondisi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
- Bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia pada era Kabinet Indonesia Maju dibandingkan dengan negara-negara di dunia dan juga dengan kondisi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Sementara itu, berdasarkan rumusan-rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengetahui tingkat pengangguran di Indonesia pada era Kabinet Indonesia Maju dibandingkan dengan negara-negara di dunia dan juga dengan kondisi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
- Mengetahui tingkat kemiskinan di Indonesia pada era Kabinet Indonesia Maju dibandingkan dengan negara-negara di dunia dan juga dengan kondisi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, maka implikasi penelitian ini adalah memberikan informasi berkaitan dengan perbandingan tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan di Indonesia dengan negara-negara lain di dunia dan juga pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu, keterbaruan pada penelitian ini berkaitan dengan relevansi kebijakan publik pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam rangka mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan dengan kebijakan publik pemerintah Indonesia saat ini.

KAJIAN TEORITIS

Kabinet Indonesia Maju

Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kabinet ini dibentuk setelah Joko Widodo terpilih kembali sebagai Presiden Indonesia dalam pemilihan presiden yang berlangsung pada tahun 2019. Kabinet Indonesia Maju bertujuan untuk mengimplementasikan program-program pemerintahan yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo selama masa kampanye, serta untuk memajukan pembangunan dan reformasi di Indonesia selama masa pemerintahannya. Selanjutnya, tujuan utama dari pemerintahan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui mengurangi pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan mengurangi angka kelaparan. Oleh karena itu menurut beberapa peneliti yaitu: Fardiansyah et al. (2022), Hasan et al. (2022), Labetubun et al. (2021), dan Octaviani et al. (2023), untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat, maka terdapat berbagai kebijakan dan program-program yang dapat dijalankan pemerintah, seperti:

- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.
- Menerapkan program-program sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, seperti bantuan sosial, beasiswa, atau program bantuan bagi keluarga miskin.
- Meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia.
- Membuat program untuk mengatasi masalah kelaparan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan gizi yang baik.
- Mendukung program-program yang meningkatkan keterampilan dan pelatihan untuk membantu masyarakat mencari pekerjaan atau memulai usaha sendiri.
- Mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan perdesaan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan dan mendukung ketahanan pangan.
- Menerapkan kebijakan anti-korupsi untuk memastikan bahwa dana pemerintah digunakan secara efektif dan efisien

Pengangguran

Pengangguran adalah masalah sosial dan ekonomi yang kompleks, dan untuk menguranginya, pemerintah sering mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan

yang mencakup pelatihan keterampilan, pembukaan lapangan kerja baru, dan dukungan kepada pencari kerja (Kiranti & Nugroho, 2022; Purwanti et al., 2022; Soeharjoto et al., 2022). Selanjutnya, merujuk pernyataan dari beberapa peneliti (Nataliani et al., 2023; Ryansyah & Tambunan, 2021; Siedule & Newton, 1980) pengangguran dapat merujuk kepada berbagai situasi di mana seseorang tidak sedang bekerja atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga jenis-jenis dari pengangguran adalah sebagai berikut:

- Pengangguran terbuka: Ini adalah kondisi ketika seseorang yang mampu bekerja sedang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil menemukan pekerjaan yang sesuai.
- Pengangguran tersembunyi: Terkadang, ada orang yang sebenarnya ingin bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan karena berbagai alasan seperti ketidakmampuan untuk mengakses pasar tenaga kerja, kurangnya peluang, atau alasan lainnya. Mereka masih dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja yang menganggur.
- Pengangguran Siklus: Ini terjadi ketika seseorang kehilangan pekerjaan mereka karena faktor-faktor ekonomi seperti resesi atau perubahan musiman dalam permintaan tenaga kerja. Mereka mungkin akan kembali bekerja saat kondisi ekonomi membaik.
- Pengangguran Friksional: Ini adalah jenis pengangguran yang terjadi ketika individu baru saja lulus sekolah atau memutuskan untuk pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Ini bisa menjadi pengangguran sementara saat mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi atau minat mereka.
- Pengangguran Struktural: Terkadang ada ketidakcocokan antara kualifikasi dan keterampilan pekerjaan yang tersedia dengan kualifikasi dan keterampilan individu. Ini dapat mengakibatkan pengangguran jangka panjang karena mereka perlu meningkatkan keterampilan atau mengubah karir mereka.

Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak dapat mencapai standar hidup yang dianggap manusiawi. Lebih lanjut kemiskinan juga dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kesulitan finansial, sulitnya akses terhadap pendidikan, dan sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai (Afiyana et al., 2019; Istan, 2017; Metanfanuan et al., 2021; Parveen, 2009; Salsabilah et al., 2023). Oleh karena itu, kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan masalah uang atau kekurangan sumber daya finansial. Kemiskinan ini juga dapat mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang dan sumber daya, serta kesenjangan dalam hak-hak dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Kemiskinan dapat menghambat perkembangan individu dan masyarakat

secara keseluruhan, serta memiliki dampak negatif pada kualitas hidup mereka (Cahyono, 2014; Sany, 2019). Lebih lanjut, upaya untuk mengatasi kemiskinan biasanya melibatkan program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang dirancang untuk meningkatkan akses dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, kesadaran tentang masalah kemiskinan dan upaya untuk menguranginya juga merupakan bagian penting dari pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, pengentasan kemiskinan juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan upaya yang komprehensif yang menurut peneliti terdahulu (Fritzen, 2002; Gyimah-Brempong, 2002; Nasution, 2014; Sari et al., 2022) meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segmen tertentu dari masyarakat, tetapi juga menciptakan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.
- Mengurangi kesenjangan kekayaan antara kelompok-kelompok yang berbeda., seperti penerapan pajak yang adil, peraturan tentang kepemilikan aset, dan program redistribusi.
- Korupsi dapat menghambat pembangunan dan menciptakan ketidaksetaraan. Memerangi korupsi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan baik dan untuk kepentingan semua warga.

Lebih lanjut, semua upaya di atas harus diimplementasikan secara bersamaan dalam konteks strategi pengentasan kemiskinan yang holistik. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai sektor, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional juga dapat memperkuat upaya mengatasi kemiskinan (Halimatusa'diyah, 2015; Ihwanudin et al., 2023; Kusnadi et al., 2022; Mustanir et al., 2023; Nuruddeen Muhammad, 2010).

Kebijakan Publik

Menurut beberapa peneliti (Head & Alford, 2015; Mossbenger & Wolman, 1998; Ramdhani & Ramdhani, 2017; Sururi, 2017), kebijakan publik berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan publik adalah alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mencoba memecahkan masalah-masalah publik atau mengatasi isu-isu yang mempengaruhi masyarakat. Ini bisa berupa masalah seperti kemiskinan, pendidikan, perawatan kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Pemerintah menggunakan sumber daya yang ada, termasuk

anggaran publik, regulasi, dan program-program sosial, untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

- Kebijakan publik seringkali dirancang dengan tujuan utama melindungi atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung atau rentan. Ini mencakup aspek-aspek seperti kesejahteraan ekonomi, akses terhadap layanan publik, hak asasi manusia, dan kesetaraan.
- Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Proses ini bisa melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional atau bahkan internasional, tergantung pada sifat masalahnya.
- Kebijakan publik dapat digunakan untuk mengurangi ketidaksetaraan, mempromosikan kesetaraan hak dan peluang, dan mencapai tujuan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik sering kali dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap keadilan sosial.

Dengan demikian, kebijakan publik adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pertimbangan etis, dan nilai-nilai masyarakat. Adapun tujuan utama dari kebijakan publik adalah menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat dengan memecahkan masalah-masalah yang ada dan meningkatkan kualitas hidup warga negara.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang memiliki tujuan deskriptif (Oktris et al., 2022). Menurut Napitupulu et al. (2020), dan Nugroho et al. (2023) tujuan deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang terkait rumusan masalah pada penelitian ini yang meliputi:

- Bagaimana tingkat pengangguran di Indonesia pada era Kabinet Indonesia Maju dibandingkan dengan negara-negara di dunia dan juga dengan kondisi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
- Bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia pada era Kabinet Indonesia Maju dibandingkan dengan negara-negara di dunia dan juga dengan kondisi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

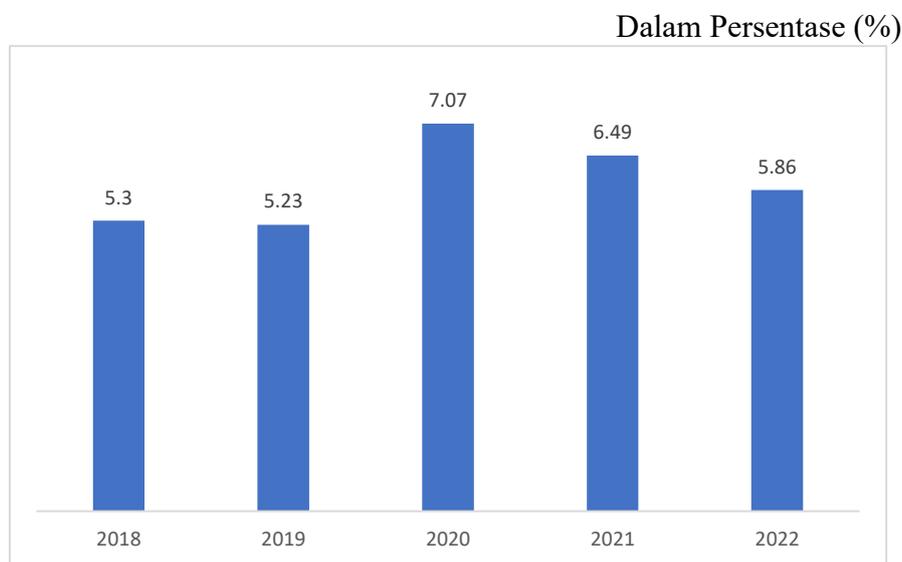
Lebih lanjut, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang mendalam tentang fenomena yang diamati sehingga tidak terdapat hipotesis atau penjelasan terkait dengan hubungan sebab-akibat. Adapun fokus dari penelitian ini

berkaitan pada empat aspek utama: (i) pengangguran, dan (ii) kemiskinan, di Indonesia pada era kabinet Indonesia maju, dan membandingkannya dengan negara-negara di dunia serta kondisi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Metode penelitian kualitatif mencakup pengumpulan data melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, maupun studi kasus terkait dengan empat yang aspek diteliti pada artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengangguran

Kondisi pengangguran di Indonesia sejak terjadinya pandemi Covid-19 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



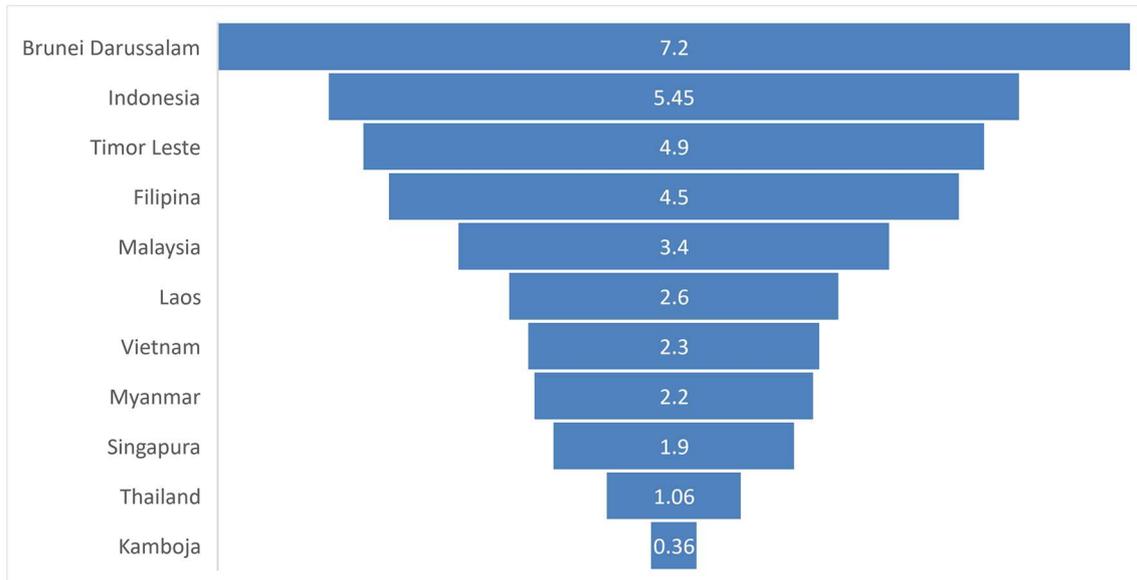
Sumber: BPS (2023)

Gambar 2. Pengangguran Indonesia Periode 2018–2022

Merujuk pada gambar 2 di atas, maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2018, persentase pengangguran di Indonesia memiliki trend peningkatan dimana pada tahun 2018 persentase pengangguran mencapai 5,3% dan pada tahun 2022 mencapai 5,86%. Lebih lanjut, tingkat pengangguran mencapai puncaknya selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 yaitu mencapai 7,07%. Dimana bertepatan dengan kondisi pandemi Covid-19. Pandemi COVID-19 telah memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian global dan menyebabkan gangguan ekonomi yang serius di seluruh dunia dimana salah satu dampaknya adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang bertujuan untuk mengatasi penurunan pendapatan dan menghemat biaya, beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau

pemangkasan tenaga kerja. Hal ini berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Lebih lanjut, posisi tingkat pengangguran Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia adalah sebagai berikut:



Sumber: Annur & Ahdiat (2023)

Gambar 3. Tingkat Pengangguran di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN

Berdasarkan data Trading Economy dan gambar 3 di atas, Indonesia adalah negara dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua di Asia Tenggara tahun ini (Annur & Ahdiat, 2023). Tercatat, tingkat pengangguran di dalam negeri mencapai 5,45% pada Februari 2023. Sementara, Brunei Darussalam menjadi negara dengan tingkat pengangguran paling tinggi di Asia Tenggara, yakni mencapai 7,2%. Kemudian di urutan ketiga ada Timor Leste dengan tingkat pengangguran 4,9%, diikuti Filipina 4,5%, dan Malaysia 3,4%. Dengan demikian, tingkat pengangguran di Indonesia dibandingkan negara-negara di ASEAN relatif masih tinggi, oleh karenanya, pemerintah Indonesia harus dapat mencari solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Pada sisi lain, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hampir tidak ada masyarakatnya yang menganggur dimana pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatasi pengangguran melalui kebijakan revitalisasi dan pengembangan lahan pertanian yang tidak produktif. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan motivasi kepada rakyat untuk memperbaiki dan menghidupkan lahan pertanian yang mati, mendorong pertumbuhan pemukiman dan pertanian. Perhatiannya terhadap pertanian menjadi pemicu peningkatan kualitas hasil tanaman sehingga menjadikan sektor ini sebagai salah satu sumber penghasilan

utama masyarakat pada masa itu. Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menjadikan tanah kharāj (tanah produktif) adalah milik umat Islam dan milik bersama ummat disertai pelarangan penjualan lahan garapan agar tidak ada penguasaan lahan, ditujukan untuk optimalisasi kebermanfaatan lahan tanah juga dimaksimalkan untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga semua rakyatnya mendapatkan hak untuk mencari penghasilan (Damang et al., 2023; Wartoyo, 2019).

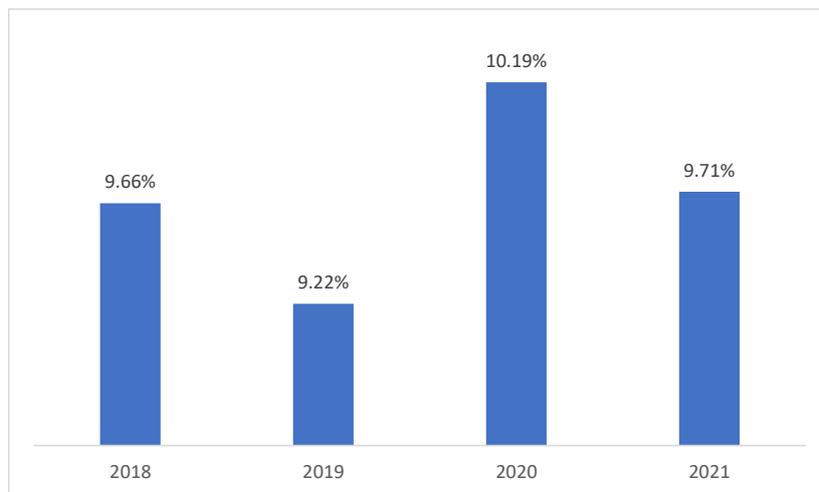
Oleh karenanya, untuk mengatasi pengangguran dan mengembangkan sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan merujuk pada kebijakan publik dari pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka pengelolaan lahan pertanian yang efisien dan inklusif dapat menjadi salah satu kunci untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di negara agraris seperti Indonesia melalui implementasi kebijakan-kebijakan publik sebagai berikut:

- Revitalisasi lahan tidak produktif, pemerintah dapat mengidentifikasi lahan pertanian yang tidak produktif atau terbengkalai dan memberikan insentif kepada petani atau masyarakat lokal untuk menghidupkannya kembali.
- Mengembangkan sektor pertanian, pemerintah harus memiliki kebijakan publik yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian dengan memperbaiki kualitas hasil tanaman dan meningkatkan produktivitas dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan publik tersebut dapat berkaitan dengan pelatihan petani, pemberian benih berkualitas, serta investasi dalam infrastruktur pertanian.
- Menerapkan konsep kepemilikan bersama atau pengelolaan bersama lahan pertanian, seperti yang diterapkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dapat memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan lahan tersebar secara adil di masyarakat. Implementasi dari konsep kepemilikan bersama dapat membantu mencegah akumulasi lahan oleh sejumlah kecil individu atau perusahaan.
- Memastikan bahwa lahan pertanian tidak digunakan untuk tujuan spekulatif atau sekadar penguasaan lahan yang tidak produktif penting untuk menjaga ketersediaan lahan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan pertanian.
- Kebijakan yang berhasil dalam pengembangan sektor pertanian dan pengurangan pengangguran seringkali melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, petani, dan masyarakat lokal. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat membantu mencapai hasil yang lebih baik.

Dengan demikian, melalui implementasi kebijakan-kebijakan publik di atas, maka pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan potensi sektor pertanian dan lahan pertanian yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka pengangguran.

Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Indonesia dalam empat tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan yang dilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPS (2023)

Gambar 4. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2018–2021

Gambar 2 di atas menunjukkan indeks kemiskinan Indonesia pada 2018-2021. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia selama periode tersebut terus meningkat, dengan jumlah pengangguran tertinggi sebanyak 27,5 juta jiwa atau setara dengan 10,19% dari total penduduk pada tahun 2020.

Sedangkan dalam regional Asia, tingkat kemiskinan di Indonesia pada 2021 berada di urutan ketujuh di bawah Thailand dan Sri Lanka menurut data Multidimensional Poverty Index (MPI) di bawah ini:

Tabel 2. Multidimensional Poverty Index Tahun 2021

No	Negara	Wilayah	(%)
1	Turkmenistan	Asia Tengah	0.2
2	Kyrgyzstan	Asia Tengah	0.4
3	Kazakhstan	Asia Tengah	0.5
4	Thailand	Asia Tenggara	0.6
5	Uzbekistan	Asia Tengah	1.7
6	Sri Lanka	Asia Selatan	2.9
7	Indonesia	Asia Tenggara	3.6

Sumber: United Nations Development Programme (2022)

Multidimensional Poverty Index (MPI) adalah sebuah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemiskinan dengan cara yang lebih komprehensif daripada hanya mengukur berdasarkan pendapatan atau aspek tunggal lainnya. Dengan menggunakan MPI, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemiskinan dengan mempertimbangkan beberapa dimensi atau aspek kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (Duflo, 2018). Angka MPI yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, karena semakin banyak dimensi yang diperhitungkan dalam pengukuran tersebut. Oleh karena itu, merujuk pada tabel 2 di atas, maka tingkat kemiskinan di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN, yaitu Thailand. Dengan demikian, pemerintah Indonesia perlu melakukan optimalisasi program-program atau usaha yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.

Pada sisi lain, menurut (Sadallah & Abdul-Jabbar, 2022; Salma & Rusyana, 2023) kebijakan publik dalam mengentaskan kemiskinan yang diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai salah satu pemimpin Muslim yang terkenal karena kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi pro-rakyatnya adalah sebagai berikut:

- Salah satu langkah penting yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah membantu rakyat yang terlilit hutang dari dana Baitul Mal (kas negara). Kebijakan ini menunjukkan perhatiannya terhadap kondisi ekonomi rakyat yang kurang mampu dan upaya untuk mengurangi beban mereka.
- Memberikan otonomi kepada daerah dalam pengelolaan zakat adalah langkah yang mendorong keadilan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini memungkinkan pengelolaan sumber daya lokal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat setempat.

- Ketika daerah menghadapi kekurangan dalam pendapatan dari zakat dan pajak, pemerintah pusat memberikan subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini adalah contoh kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
- Pengawasan distribusi zakat, pembagian zakat yang adil mencerminkan tingkat transparansi dan pengawasan yang baik dalam distribusi zakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa zakat benar-benar mencapai mereka yang membutuhkannya.

Merujuk dari kebijakan publik dari pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu solusi bagi Indonesia yang memiliki populasi Muslim yang besar melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat sipil untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Usaha optimalisasi pengelolaan zakat ini termasuk mengidentifikasi mustahiq (penerima zakat) yang berhak menerima bantuan dan pengalokasian zakat kepada mereka dengan efisien.
- Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, memberikan otonomi daerah dalam pengelolaan zakat dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih lokal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
- Ketika daerah menghadapi kekurangan dana zakat atau pajak untuk membantu masyarakat miskin, pemerintah pusat dapat memberikan subsidi untuk memastikan bahwa kesejahteraan rakyat di seluruh negara tetap terjamin.
- Selain membantu mereka yang sudah miskin, pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah kemiskinan, seperti program pelatihan keterampilan, akses ke pendidikan yang lebih baik, dan insentif untuk menciptakan lapangan kerja.
- Menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan pajak serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang tepat. Pengawasan yang efektif oleh otoritas terkait dan masyarakat sipil dapat membantu menghindari penyalahgunaan dana.
- Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dan pajak dalam membantu sesama serta menjaga keadilan sosial adalah langkah penting. Kampanye pendidikan dan kesadaran publik dapat meningkatkan partisipasi dalam kontribusi zakat.

Selanjutnya, dengan mengimplementasikan kebijakan publik yang berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola zakat dan pajak yang baik dan diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka pemerintah Indonesia dapat lebih efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil dan pembahasan di atas, maka pemerintah Indonesia dapat mengadopsi kebijakan pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang antara lain:

- Pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan kebijakan publik yang mendukung pemanfaatan potensi sektor pertanian dan lahan pertanian yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka pengangguran seperti yang diterapkan pada masa Khalifah Umat bin Abdul Aziz.
- Pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan kebijakan publik yang berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola zakat dan pajak yang baik yang pernah diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

DAFTAR REFERENSI

- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222–229. <https://doi.org/10.29264/JAKT.V16I2.6013>
- Annur, M. C., & Ahdiat, A. (2023). *Tingkat Pengangguran Indonesia Tertinggi ke-2 di ASEAN*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/06/tingkat-pengangguran-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asean>
- Annur, M. C., & Santika, E. F. (2023). *Indonesia Mendominasi Jumlah Penduduk di Asia Tenggara, Berapa Besarnya?* Databoks.Katadata.Co.Id/. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/31/indonesia-mendominasi-jumlah-penduduk-di-asia-tenggara-berapa-besarnya>
- Bilgies, A. F., Fauzan, R., Wahyudi, I., Syahrir, N., Nugroho, L., Aziz, R. M., Usadha, I. D. N., & Maulidizen, A. (2023). *Manajemen Keuangan Islam*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=eq3FEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA181&ots=Dqa6Lzt7y1&sig=w9Tv_RPIP_5f7wpMawSAGxUIPmI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- BPS. (2023). *BERITA RESMI STATISTIK*. Bps.Go.Id. https://www.archive.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20231201114938.pdf
- Cahyono, B. (2014). Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.30659/ekobis.15.1.1-16>
- Damang, M., Sirajuddin, & Sabbar, S. D. (2023). Relasi Negara, Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Islam. *Attractive : Innovative Education Journal*, 5(1), 112–126.
- Duflo, E. (2018). *The multidimensional poverty index: Achievements, conceptual and empirical issues* (Issue 244).
- Fardiansyah, H., Nasfi, N., Nahriana, N., Sattar, S., Nurjannah, N., Syamsir, S., Mustari, M., Nurdiana, N., Nugroho, L., Yanti, N. N. S. A., Supatminingsih, T., Hasyim, S. H., Abidin,

- Z., & Hasbi, I. (2022). Perkoperasian. In E. Damayanti (Ed.), *Widina Bhakti Persada*. Widina Bhakti Persada.
- Fasa, I., Febrianty, M., Khoerulloh, A. K., Arisa, A., Utami, W., Santoso, I. R., Arifudin, O., Suganda, A. D., Nugroho, L., & Haerany, A. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com
- Fritzen, S. (2002). Growth, inequality and the future of poverty reduction in vietnam. *Journal of Asian Economics*, 13(5), 635–657. [https://doi.org/10.1016/S1049-0078\(02\)00173-2](https://doi.org/10.1016/S1049-0078(02)00173-2)
- Gyimah-Brempong, K. (2002). Corruption, economic growth, and income inequality in Africa. *Economics of Governance*, 3(3), 183–209. <https://doi.org/10.1007/s101010200045>
- Halimatusa'diyah, I. (2015). Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia. *Journal of Civil Society*, 11(1), 79–99. <https://doi.org/10.1080/17448689.2015.1019181>
- Harahap, K. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz. *Jurnal Ipteks Terapan*, 8(2), 58–69. <https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i2.424>
- Hasan, M., Hartoto, H., Abdelina, A., Riyaldi, M. H., Aswanto, A., Akbar, T., Juliansyah, R., Talakua, B. A., Firmansyah, H., Nugroho, H., Ferdinandus, A. Y., Sattar, S., Apriyeni, D., & Nugroho, L. (2022). Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis. In R. Septiani (Ed.), *Widina Media Utama*. Widina Media Utama.
- Head, B. W., & Alford, J. (2015). Wicked Problems: Implications for Public Policy and Management. *Administration and Society*, 47(6), 711–739. <https://doi.org/10.1177/0095399713481601>
- Ihwanudin, N., Nugroho, L., Bangun, R., Darmaningrum, K., Juliansyah, R., MY, A. S., Dewi, I. C., Nopiyani, P. E., Kraugusteeliana, K., Krisnanik, E., Suganda, A. D., Aryani, L., Marietza, F., Yudawisastra, H. G., Koynja, J. J., & Purwanda, E. (2023). EKONOMI DAN BISNIS DIGITAL. In E. Damayanti (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/560990/ekonomi-dan-bisnis-digital#cite>
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 81–99. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.199>
- Kiranti, D. E., & Nugroho, L. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran serta Jabatan Kerja Kritis. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 335–341. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1145>
- Kusnadi, E. W., Nugroho, L., & Utami, W. (2022). Kajian Dinamika dan Tantangan Jiwa Kewirausahaan pada Generasi Muda. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 1645–1656.
- Labetubun, M. A. H., Kembauw, E., Hasan, M., Arifudin, O., Yulistiyono, A., Maulina, D., Tanjung, R., Nopralia, S., Hasanuddin, H., Mustamin, S. W., Rachmarwi, W., Hartoto, H., Azizi, M., Siregar, R. T., Solikin, A., & Nugroho, L. (2021). Sistem Ekonomi Indonesia. In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Metanfanuan, T., Herlambang, M. A. T., Krishernawan, I., Lestari, N. P., Ginting, S., Supriyanto, E. E., & Nugroho, L. (2021). *Pengantar Manajemen Potensi Desa: Aku Yakin desaku Punya Sejuta Potensi*. Agrapana Media. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=bo8aEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA143>

&ots=xdt6Fio57x&sig=v3og58MGod_st1m7XxyVLL3HP_Y&redir_esc=y#v=onepage
&q&f=false

- Mossbenger, K., & Wolman, H. (1998). Policy Transfer as a Form of Prospective Policy Evaluation: Challenges and Recommendations. *Public Administration Review*, 130(2), 556. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.05.050>
- Muhtadi, R., Luthfi, F., Jasri, Rukmana, A. Y., Hamilunniám, M., Mutmainah, L., Wahidah, R., W., Nugroho, L., & Sunjoto, A. R. (2023). *MENELUSURI JEJAK SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM* (1st ed.). Getpress Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gvLMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&ots=eVkcBpfsmi&sig=iKoV4nJcMp2qNrzrbtvUwve4ul0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Mustanir, A., Aromatica, D., Utari, D. S., Nugroho, L., Faried, A. I., Kusnadi, I. H., Purnamaningsih, P. E., & Wismayanti, K. W. D. (2023). *Dinamika Administrasi Publik Indonesia* (First). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XsqpEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA53&ots=YftUF1RKTX&sig=JXZiP9q7fAEZvoPcF72ZWAcbqeQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Napitupulu, D., Nugroho, L., Fauzi, A., Permana, S. D. H., Lutfiyana, N., Setyawati, I., Bahri, A. S., Samosir, R. S., Ananto, P. D., Tallo, A. J., & Nisa, B. (2020). *Mudah Membuat Skripsi/Tesis* (Pertama). CV. Penerbit Qiara Media.
- Nasution, Z. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Jurnal Ecobisma*, 1(2), 1–10. <https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>
- Nataliani, D., Sitepu, B., Samri, Y., & Nasution, J. (2023). PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA BINJAI TAHUN 2018-2022. *JES [Jurnal Ekonomi STIEP]*, 8(2), 1–7.
- Nugroho, L. (2023a). *Banyaknya Lembaga Keuangan Syariah Merupakan Keniscayaan*. Bacadulu.Net. <https://bacadulu.net/baca-informasi/banyaknya-lembaga-keuangan-syariah-merupakan-keniscayaan>
- Nugroho, L. (2023b). Reshaping the Mindset of Halal Entrepreneurs Toward Sustainable Business: The Case of Indonesia BT - Contemporary Discourse of Halal and Islamic Entrepreneurship: Trends and Future Opportunities. In L. Raimi, S. M. Adekunle, & M. S. Shabbir (Eds.), *Contemporary Discourse of Halal and Islamic Entrepreneurship: Trends and Future Opportunities* (pp. 207–221). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-6427-7_14
- Nugroho, L., Chandra Husnadi, T., Utami, W., & Hidayah, N. (2017). Masalah and Strategy To Establish a Single State-Owned Islamic Bank in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1), 17–33.
- Nugroho, L., Fajarsari, I. M., Solikin, A., Yusdita, E. E., Fatriansyah, A. I. A., Irwanto, I., Atiningsih, S., Susilawati, N., Gainau, P. C., Hippy, M. Z., Rahmadi, H., Januarsi, Y., & Faisol, I. A. (2023). Metodologi Penelitian Akuntansi dan Praktik Penulisan Artikel Bidang Akuntansi. In N. Rismawati (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Nuruddeen Muhammad, I. (2010). Scholars, merchants and civil society: Imperative for waqf-based participatory poverty alleviation initiatives in Kano, Nigeria. *Humanomics*, 26(2), 139–157. <https://doi.org/10.1108/08288661011074936>

- Octaviani, L. K., Sari, D. P., Madjid, R., Rohani, E. D., Nugraha, I. G. P., Sinurat, J., Utami, M. M., Syahadat, R. M., Adriani, H., Mahardhani, A. J., Nugroho, L., Sarbini, S., Fitri, E. S. M., Yudawisastra, H. G., & Susanty, S. (2023). KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA (TINJAUAN KONSEP DAN PRAKTIK). In *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/563800/kebijakan-pengembangan-pariwisata-tinjauan-konsep-dan-praktik#cite>
- Oktris, L., Tarmidi, D., Nugroho, L., Anasta, L., & Fadjareni, A. (2022). *Tips & Trik Cara Praktis Menyusun Skripsi dan Tesis (Pertama)*. Pustaka Pranala.
- Parveen, J. A. (2009). SUSTAINABILITY ISSUES OF INTEREST-FREE MICRO-FINANCE INSTITUTIONS IN RURAL DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION. THE BANGLADESH PERSPECTIVE. *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, 4(2), 112–133.
- Purwanti, T., Ristiyana, R., Libriantono, B., Widayati, T., Budiman, N. A., Nugroho, L., Kusnadi, I. H., Canberra, Ilmiha, J., & Sari, M. N. (2022). *UMKM Membangun Ekonomi Kreatif*. Global Eksekutif Teknologi. https://www.google.co.id/books/edition/UMKM_Membangun_Ekonomi_Kreatif/IaqmEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=umkm+membangun+ekonomi+kreatif&pg=PR4&printsec=frontcover
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Ridwan, M., Zebua, R. S. Y., Abasir, M. A., Sari, I. F., Muhsin, S., Nugroho, L., Yahya, A. M., & Soeharjoto. (2023). *Maqashid syariah*. Getpress Indonesia.
- Rosyidi, M. H. (2017). Kepemimpinan Profetik Umar Bin Khattab Dan Umar Bin Abdul Aziz. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 10(2), 19–31. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/53>
- Ryansyah, M., & Tambunan, K. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia. *TRIANGLE Journal Of Management, Accounting, Economic and Business*, 02(04), 486–491. <http://trianglesains.makarioz.org>
- Sadallah, M., & Abdul-Jabbar, H. (2022). Business zakat compliance in Algeria: an ethical perspective. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(2), 338–355. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2021-0085>
- Sali, M. A. (2019). Distinction of Justice and Fairness during Umar bin Abdul Aziz's Reign. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 4(2), 127. <https://doi.org/10.29240/ajis.v4i2.954>
- Salma, S. H. S., & Rusyana, A. Y. (2023). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3(1), 7–14. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1705>
- Salsabilah, S., Nugroho, L., & Zulfahmi, Z. (2023). KAJIAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Studi Kasus pada Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan). *Jurnal Economina*, 2(6), 1193–1202. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.577>
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>

- Sari, W., Prayendi, D. A., Aulia, R. G., Idzni, H., Yunus, S. M., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(1), 1–10.
- Siedule, T., & Newton, K. (1980). Cyclical, Non-Cyclical and Hidden Unemployment in Canada. *International Journal of Manpower*, 1(4), 3–5. <https://doi.org/10.1108/eb044835>
- Soeharjoto, I. R., Hypon, J. C., Sidi, K. N., Tjahjadi, E. R., Natalya, E., Soeharjoto, & Nugroho, L. (2022). BERLAKUNYA HIPOTESIS U TERBALIK DARI KUZNETS PADA DETERMINASI KESEJAHTERAAN DI INDONESIA. *Media Bina Ilmiah*, 16(11), 7801–7808.
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 4(3), 1–14. <https://doi.org/10.30656/sawala.v4i3.241>
- United Nations Development Programme. (2022). Global Multidimensional Poverty Index 2021: Unmasking Disparities by Ethnicity, Caste and Gender. In *Global Multidimensional Poverty Index 2021*. <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210018159>
- Wartoyo, W. (2019). Sistem Regulasi Dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 71–97. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.541>